

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	4
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

DPRD Jakarta Tolak Anggaran Pulau Sampah

Palmerah, Warta Kota

DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jakarta untuk mengevaluasi rencananya membangun pulau sampah di Kepulauan Seribu atau pesisir utara Jakarta. Alih-alih menjadi solusi penanganan sampah, pembanguann sampah di pulau dikhawatirkan mencemari laut sekitar.

"Jangan kita cemari lagi dengan sampah yang mau kita buang ke sana. Itu sih kekhawatiran

kami," ujar Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah pada Minggu (11/8/2024).

Menurut Ida, adanya teknologi Refuse Derived Fuel (RDF) dan Tempat Pengelolaan Sampah Reduce Reuse Recycle (TPS 3R) dinilai cukup menangani sampah Jakarta. Makanya, Ida menolak pengajuan anggaran Rp 257 juta oleh DLH Jakarta untuk mengkaji rencana pembangunan pulau sampah yang ada di pesisir ataupun Kepulauan Seribu.

"Kalau RDF yang di Rorotan jadi, lalu beberapa TPS 3R bisa terselesaikan, saya yakin permasalahan sampah bisa terselesaikan dengan baik. Tidak perlu lagi membuang anggaran," tegasnya.

Ida menambahkan, "Coba berpikirlah kenapa sih mesti reklamasi kok dibuat pengelolaan sampah? Ini enggak masuk di akal sih menurut saya. Jadi, mohon maaf jangan berpikir kita mau bikin kajian itu untuk coba-coba."

Diketahui, DLH Provinsi DKI Jakarta mengajukan anggaran Rp 257 juta untuk biaya kajian reklamasi pulau sampah. Dana itu diajukan dalam Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2024 yang tengah dibahas di Komisi D DPRD DKI Jakarta.

Kepala DLH Jakarta Asep Kuswanto mengatakan, mereka sudah mengajukan anggaran Rp 257 juta dalam Perubahan Anggaran 2024 untuk mengkaji pulau sampah.

Kajian tersebut untuk mengikuti arahan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang menginisiasi pembangunan reklamasi pulau sampah seperti halnya Singapura dan Maladewa.

"Kedua negara itu sudah sukses membangun pulau sampah tersebut. Tujuan kami kajian pulau sampah ingin melihat kajian uji tuntas terhadap regulasi-regulasi yang memang pernah dibuatkan baik oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah," kata Asep pada Minggu (11/8/2024).

Menurutnya, rencana reklamasi pulau sampah itu menjadi bagian dari pengelolaan sampah di tingkat hilir.

Selain terdapat pengelolaan sampah di tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) Bantargebang dan pengoperasian pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSA).

Termasuk pula pengoperasian fasilitas penambangan lahan urug zona tidak aktif dengan karakteristik sampah yang sudah terdekomposisi agar bisa digunakan kembali (landfill mining), serta pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif (RDF) Plant di Bantargebang.

"Kami berpikir bagaimana kami mencoba untuk membangun pulau tersendiri untuk membangun pulau sampah," cetusnya. (faf)